

NOTULA FKP BRMP KALSEL

Hari/Tanggal : Selasa/21 Oktober 2025

Waktu : 09:00 – 12:00 WITA

Tempat : Aula BRMP Kalimantan Selatan

Penyelenggara: Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Selatan

I. Latar Belakang

Public Hearing ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen BRMP Kalimantan Selatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Kegiatan ini juga menjadi forum penyampaian aspirasi dan saran guna meningkatkan inovasi serta efektivitas pelayanan BRMP di bidang pertanian.

II. Sambutan

1. Kepala BRMP Kalimantan Selatan

- Menyampaikan bahwa transisi dari BSIP ke BRMP telah dimulai sejak bulan Juni.
- Public Hearing merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas layanan BRMP kepada publik.
- Menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan tenaga pendidik dalam membangun pelayanan yang sesuai kebutuhan lapangan.

2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan

- Public Hearing menjadi ajang silaturahmi dan forum rekomendasi di sektor pertanian.
- Menggarisbawahi pentingnya kebersamaan seluruh pihak dalam membangun ketahanan pangan.
- Menyampaikan perlunya modernisasi pertanian dan perakitan inovasi baru untuk mendukung sektor pertanian yang berkelanjutan.
- Membuka acara Public Hearing secara resmi

III. Pemaparan Materi

1. Materi I – Bapak Syarif (KTU BRMP Kalsel)

Moderator: Bapak Sholih (BRMP Kalsel)

- Dasar hukum kegiatan mengacu pada Undang-Undang tentang Standar Pelayanan Publik.
- Setiap masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang berkualitas dan wajib mematuhi standar pelayanan yang ditetapkan.
- Disampaikan profil BRMP Kalsel serta jenis-jenis layanan yang tersedia.
- Informasi layanan dapat diakses melalui website resmi BRMP dan PPID.
- Saluran pengaduan tersedia melalui platform online yang telah disiapkan.
- Harapan agar Public Hearing ini dapat menjadi sarana evaluasi dan pengembangan layanan BRMP Kalsel secara berkelanjutan.

2. Materi II – Ombudsman Republik Indonesia, Bapak M. Firhansyah

- Menjelaskan filosofi *Quantum of Public Service*, yaitu pentingnya keadilan dan sensibilitas dalam pelayanan publik.
- Menekankan bahwa pelayanan publik tidak cukup hanya dengan niat baik, namun perlu keahlian dan tindakan nyata.
- Diperlukan *Total Quality Service* (TQS) dan *Total Quality Management* (TQM) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik di front office maupun back office.
- Ombudsman berperan sebagai pencegah maladministrasi dan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat.
- Pentingnya membangun fasilitas layanan publik yang inklusif, terutama bagi kelompok rentan (perempuan, ibu dan anak, lansia, penyandang disabilitas).
- Laporan pengaduan dianggap wajar dan harus diterima serta direspon dengan baik oleh penyelenggara layanan.

IV. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab

Sesi 1

1. Bapak Rahman Rijani – Komisi Informasi dan Komunikasi Kalsel

- Menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dan peran Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi.

- Mendorong BRMP Kalsel untuk menyusun SOP informasi terbuka dan tertutup.

Tanggapan BRMP Kalsel (Bapak Syarif):

Telah ada arahan pusat terkait penyusunan SOP layanan publik. BRMP baru mengetahui keberadaan Komisi Informasi pada tahun 2024 dan menyambut baik usulan kerja sama ke depan.

2. Ibu Ani Susilawati – BRMP Rawa

- Menyampaikan permohonan agar BRMP Kalsel dapat memproduksi varietas padi rawa (Inpara), karena BRMP Rawa sudah tidak lagi memiliki tupoksi untuk memproduksi benih padi rawa tersebut.

Tanggapan Kepala BRMP Kalsel:

Produksi varietas Inpara sempat dilakukan, namun kurang diminati sebagai benih tanam. Akan dipertimbangkan kembali agar dapat memenuhi kebutuhan petani.

3. Bapak Sabur – BRMP Kalsel

- Menyampaikan tantangan terkait keterbatasan anggaran, SDM, dan fasilitas dalam memproduksi semua jenis varietas benih.

Tanggapan Ombudsman:

- Perlu penyusunan standar layanan yang adaptif.
- Substansi layanan yang belum terpenuhi dapat dimasukkan dalam sistem pengelolaan pengaduan (LOLADU).
- Disarankan audit komunikasi dan peningkatan kompetensi petugas pelayanan.

Sesi 2

1. Bapak Yudi – UPT Pelaihari

- Mempertanyakan tugas BRMP Kalsel dalam diseminasi informasi dan pendampingan.
- Informasi hanya tersedia melalui web, padahal tidak semua petani melek teknologi.

Tanggapan Ombudsman:

Pentingnya audit komunikasi dan pengembangan skema penyelesaian pengaduan yang melibatkan pelapor.

Tanggapan BRMP Kalsel:

Dijelaskan perbedaan tugas berdasarkan jenjang eselon dalam struktur organisasi. Akan ditingkatkan pendekatan lapangan, termasuk melalui penyuluhan.

2. Perwakilan Dinas Pertanian Barito Kuala

- Menyarankan agar BRMP meningkatkan koordinasi dengan dinas kabupaten/kota untuk memperluas penyebaran informasi teknologi pertanian.

Tanggapan BRMP:

Komitmen untuk meningkatkan koordinasi dan pelibatan dinas dalam kegiatan diseminasi, seperti temu lapang.

3. Bapak Soleh – Balai Besar Pelatihan Binuang

- Menyampaikan usulan kerja sama dalam diseminasi teknologi kepada petani, penyuluhan, dan pengawas.

Tanggapan BRMP:

Terbuka untuk kolaborasi guna mempercepat penyebaran inovasi pertanian.

Pertanyaan kepada Ombudsman:

Apakah ada program sosialisasi berkala dari Ombudsman ke UPT/Lembaga?

Tanggapan Ombudsman:

Usulan dicatat dan akan ditindaklanjuti sebagai bahan pengembangan program.

V. Penutup

- Telah disampaikan **Berita Acara Kesepakatan Maklumat Pelayanan** oleh Ketua Tim Diseminasi BRMP Kalsel, Bapak Abdul Sabur dan kemudian ditandatangani oleh BRMP Kalsel dan beberapa stakeholder yang hadir dalam acara Public Hearing
- Seluruh saran dan masukan dari peserta public hearing akan dijadikan bahan evaluasi dan peningkatan mutu layanan BRMP Kalsel ke depan.

Dokumentasi Pendukung:





Notulis: Niken Emelia Oktaviani Sitompul

Ditetapkan di: Banjarbaru

Tanggal: 22 Oktober 2025